

**MANAJEMEN PENANGANAN TANGGAP DARURAT  
BENCANA BANJIR DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Muhammad Shaufi Taqiyuddin

NPP. 30.1017

*Asdaf Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan*

*Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: [30.1017@praja.ipdn.ac.id](mailto:30.1017@praja.ipdn.ac.id)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Backgroud:** Hulu Sungai Utara Regency, where the majority of the area is swampy plus the factor of high rainfall and flood submissions from higher areas, causes flood disasters in Hulu Sungai Utara Regency to occur every year. As a result, affected communities experience losses in both material and non-material forms. **Purpose:** The purpose of this research is to find out how the management of flood disaster emergency response in Hulu Sungai Utara Regency, South Kalimantan Province. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach, while the data sources studied are obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and then conclusion drawing. **Result:** The results of this study indicate that the management of flood disaster emergency response in Hulu Sungai Utara Regency is running well but not optimal because it is constrained by several things that become inhibiting factors including limited resources, not having an SOP for implementation, and a slow budget disbursement mechanism as well as lack of public knowledge about disaster management, on the other hand, the supporting factors are high community participation and good coordination as well as community habits that have been formed in anticipating floods. However, the Regional Disaster Management Agency of Hulu Sungai Utara Regency always makes efforts to overcome the obstacles encountered in the emergency response management process so that the community is helped and the risk of flood disasters can be reduced or not have such a big impact. **Conclusion:** Based on the results of the research, it can be concluded that the management of flood disaster emergency response in Hulu Sungai Utara Regency has been running quite well.

**Keywords:** flood, disaster, emergency response, management, BPBD

## ASTRAK

**Permasalahan/ Latar Belakang (GAP):** Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mayoritas wilayahnya adalah rawa ditambah faktor curah hujan yang tinggi dan banjir kiriman dari daerah yang lebih tinggi menyebabkan bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara terjadi setiap tahun. Akibatnya, masyarakat terdampak mengalami kerugian baik dalam bentuk material maupun non-material. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen penanganan tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, sedangkan sumber data yang diteliti diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen penanganan tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara berjalan dengan baik namun belum optimal karena terkendala beberapa hal yang menjadi faktor penghambat diantaranya terbatasnya sumber daya, belum mempunyai SOP pelaksanaannya, dan mekanisme pencairan anggaran yang lambat juga kekurangtahuan masyarakat tentang penanggulangan bencana, disisi lain faktor pendukungnya adalah partisipasi masyarakat yang tinggi dan koordinasi yang baik serta kebiasaan masyarakat yang sudah terbentuk dalam antisipasi banjir. Meskipun demikian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu melakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam proses manajemen tanggap darurat sehingga masyarakat tertolong dan resiko bencana banjir dapat dikurangi atau tidak berdampak begitu besar. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manajemen penanganan tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah berjalan dengan cukup baik.

**Kata Kunci:** banjir, bencana, tanggap darurat, manajemen, BPBD

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Banjir adalah bencana alam yang menjadi masalah setiap tahun di Provinsi Kalimantan Selatan yang berdampak merugikan bagi kehidupan masyarakat setempat yang dapat dilihat dengan adanya korban jiwa, permukiman atau wilayah tempat tinggal masyarakat yang rusak, dan fasilitas umum yang tidak dapat dioperasikan. Daerah Kalimantan Selatan yang banyak dialiri oleh sungai-sungai dan curah hujan yang tinggi merupakan faktor penyebab terjadinya banjir. Hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami bencana banjir dalam waktu yang bersamaan, oleh karena itu agar jumlah kerugian yang ditimbulkan dapat dikendalikan sehingga tidak banyak lagi kerugian dan dampak buruk yang serius serta tidak adanya korban jiwa lagi akibat bencana banjir, maka diperlukan penanganan serius terhadap bencana banjir oleh pemerintah daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan tanggap darurat bencana atau pada saat terjadi banjir.

Salah satu wilayah yang mengalami bencana banjir adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang wilayahnya merupakan pertemuan dua sungai besar di Tabalong dan Balangan, sehingga berpengaruh terhadap ketinggian air di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Banjir yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan banjir kiriman dari Kabupaten lain/tetangga yang daerahnya lebih tinggi dan menjadi tradisi tahunan yang menggenang dan tidak berarus tetapi memerlukan waktu yang lama untuk surut sehingga mengakibatkan banyaknya sarana dan prasarana yang tergenang air sehingga berdampak pada rusaknya kehidupan dan penghidupan serta aktivitas masyarakat seperti terendahnya ruas jalan, pasar, masjid, sekolah, perumahan masyarakat, lahan pertanian serta tempat-tempat penting lainnya. Besarnya kapasitas banjir yang melanda wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada setiap tahunnya tidak bisa diperkirakan secara spesifik karena proses terjadinya banjir di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terjadi karena curah hujan kemudian bergiliran dari daerah tinggi ke daerah rendah dan tergantung pada kiriman air dan kondisi banjir di Kabupaten tetangga yang daerahnya lebih tinggi.

Salah satu wilayah yang mengalami bencana banjir adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan pertemuan dua sungai besar di Tabalong dan Balangan, sehingga berpengaruh terhadap ketinggian air di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Banjir yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan banjir kiriman dari Kabupaten lain/tetangga yang daerahnya lebih tinggi dan menjadi tradisi tahunan yang menggenang dan tidak berarus tetapi memerlukan waktu yang lama untuk surut sehingga mengakibatkan banyaknya sarana dan prasarana yang tergenang air sehingga berdampak

pada rusaknya kehidupan dan penghidupan serta aktivitas masyarakat seperti terendahnya ruas jalan, pasar, masjid, sekolah, perumahan masyarakat, lahan pertanian serta tempat-tempat penting lainnya. Besarnya kapasitas banjir yang melanda wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada setiap tahunnya tidak bisa diperkirakan secara spesifik karena proses terjadinya banjir di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terjadi karena curah hujan kemudian bergiliran dari daerah tinggi ke daerah terendah dan tergantung pada kiriman air dan kondisi banjir di Kabupaten tetangga yang daerahnya lebih tinggi.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berdasarkan penggalan informasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa selama ini penanganan tanggap darurat banjir dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mendirikan posko banjir dan melakukan pengkajian debit air dan dampak-dampak kerusakan. Meskipun selalu ada kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan penanganan tanggap darurat yaitu, terbatasnya sumber daya manusia yang menjadi pelaku utama dalam penanganan masalah banjir. Selain itu, juga karena masalah sarana dan prasarana yang terbatas sehingga upaya yang dilakukan belum dapat dilaksanakan dengan optimal oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Masalah lainnya adalah terkendalanya biaya dari APBD untuk penanganan bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Pertama, penelitian oleh Nurrohman (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Manajemen Tanggap Darurat Bencana Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Wilayah Bengkulu (Studi Kasus Bencana Banjir Bengkulu Mei 2019)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Manajemen Tanggap Darurat Bencana Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Wilayah Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Kedua, penelitian oleh Dio Mahardika dan Endang Larasati (2018) melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Banjir di Kota Semarang”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dalam menangani bencana banjir. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Ketiga, penelitian oleh Ayu Anggita Sari, dkk (2020) melakukan sebuah penelitian mengenai “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik”. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk untuk mengetahui peran Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Gresik dalam tanggap darurat bencana banjir yang ada. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama dengan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. Selain itu, pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori manajemen menurut George R. Terry yang meliputi empat indikator, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan.

#### **1.5. Tujuan**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan ini meliputi:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

#### **I METODE**

Penelitian ini menggunakan metode ini menggunakan metode menurut Sugiyono (2013). Dimana menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan teknik yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumen. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sugiono (2013).

#### **II HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1.1. Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Penulis menganalisis penelitian ini menggunakan teori manajemen menurut George R. Terry dalam bukunya Sukarna (2011). Dimana

indikatornya meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan.

1. **Perencanaan.** Perumusan perencanaan dilakukan dengan mengkaji fakta/kondisi banjir di lapangan untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan yang telah diatur oleh Permendagri No 101 Tahun 2018, namun di Kabupaten HSU terkendala dalam SOP pelaksanaannya karena belum di tanda tangani oleh Bupati untuk menjadi prosedur yang sah secara hukum.
2. **Pengorganisasian.** Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara membentuk organisasi Pos Komando Tanggap Darurat yang terdiri dari beberapa SKPD lainnya terkait kebencanaan yang bekerja dengan baik karena adanya koordinasi yang baik, kemudian untuk mengetahui inventarisasi sumber daya yang dimiliki dilakukan dengan apel siaga dan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. **Penggerakkan.** Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara berperan sebagai koordinator dan pengarah setiap kegiatan dengan mengerahkan anggota/sumber daya Pos Komando Tanggap Darurat dan dalam melaksanakan tugasnya juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti swasta dan masyarakat.
4. **Pengawasan.** Dilakukan dengan dua cara, yaitu di lapangan yang dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten HSU secara langsung dan pengawasan secara administrasi dalam bentuk laporan seperti laporan kejadian bencana, laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban. Tujuannya adalah agar berjalan dengan maksimal dan tepat sasaran juga sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga tidak ada penyimpangan.

Faktor-faktor pendukung yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam proses manajemen penanganan tanggap darurat bencana banjir yaitu sebagai berikut.

- a. Partisipasi stakeholder dan masyarakat yang aktif.
- b. Koordinasi yang baik karena adanya dukungan dari instansi-instansi terkait dan memahami dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- c. Kebiasaan masyarakat dalamantisipasi bencana banjir yang sudah terbentuk menjadi kebiasaan saat terjadi banjir.

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam proses manajemen penanganan tanggap darurat bencana banjir yaitu sebagai berikut.

- a. Sumber Daya Manusia BPBD yang belum memadai akibat kurangnya jumlah personil sehingga menyebabkan kekosongan pada jabatan struktural, kemudian juga belum semua personil memiliki kualifikasi standar dalam penanggulangan bencana.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana.
- c. Anggaran dan mekanisme pencairannya yang lambat, hal ini

- diakibatkan karena adanya kekurangpahaman terkait fungsi dan tugasnya oleh pihak yang berwenang.
- d. Mindset masyarakat tentang penanggulangan bencana banjir yang kurang memahami pengetahuan terkait kebencanaan sehingga hanya memahami bahwa bantuan selalu berupa logistik padahal banyak jenis bantuan lain yang merupakan jenis pelayanan pemerintah dalam penanggulangan bencana.
  - e. Belum memiliki SOP yang secara sah terkait penanggulangan bencana banjir.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mengatasi faktor penghambat antara lain:

- a. BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara meminta bantuan kepada instansi-instansi terkait dan relawan yang tergabung dalam struktur organisasi pos komando penanganan tanggap darurat bencana serta dan melaksanakan pelatihan/diklat kepada para anggota Relawan (TRC) sebagai peningkatan keahlian.
- b. Untuk mengetahui jumlah personil, sarana dan prasarana terkait kebencanaan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan apel siaga dan BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara meminta bantuan terkait kekurangan yang ada kepada BPBD Provinsi.
- c. Dalam mengatasi mekanisme pencairan anggaran yang lambat, BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara memakai dana siap pakai dan melakukan perjanjian dengan pihak ketiga untuk melakukan pembayaran saat anggaran tersebut sudah cair dan memaksimalkan donasi-donasi yang diterima.
- d. Melakukan kegiatan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung terkait kebencanaan kepada masyarakat.
- e. Menjalankan SOP berpedoman kepada PP No 21 Tahun 2008 yang sifatnya secara umum kemudian disesuaikan dengan keadaan di daerahnya sendiri oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## **1.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan penting pertama yang ditemukan oleh penulis adalah pada dimensi Perencanaan yang dilakukan oleh tim BPBD dalam melakukan sebuah manajemen penanganan tanggap darurat yang belum memiliki SOP tentang tanggap darurat bencana banjir di daerahnya. Namun, Hal ini dapat diatasi oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan berpedoman kepada PP No 21 Tahun 2008 yang disesuaikan dengan kondisi di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri serta mencontoh SOP dari Kabupaten tetangga dan juga dengan adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan anggota sehingga terjalin sebuah kerjasama yang baik juga dalam pelaksanaannya.

Kemudian, penelitian oleh Nurrohman (2019), melakukan penelitian dengan judul "Manajemen Tanggap Darurat Bencana Masyarakat

Relawan Indonesia (MRI) Wilayah Bengkulu (Studi Kasus Bencana Banjir Bengkulu Mei 2019)". Menunjukkan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen tanggap darurat adalah pembentukan struktur organisasi dan pembagian tugas sesuai dengan bidangnya. Hal ini juga dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki bantuan SDM dan Sarana prasarana dari organisasi Posko Komando Tanggap Darurat Bencana yang termuat dalam Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara No 188.45/588/KUM/2022.

Temuan utama yang menunjukkan kebaruan hasil penelitian penulis dibandingkan penelitian terdahulu lainnya selain metode, informan, dan lokus adalah penulis mendapati bahwa adanya faktor pendukung dalam manajemen penanganan tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti kebiasaan masyarakat yang terbentuk dalam mengantisipasi banjir karena mengalami bencana tersebut setiap tahun dan adanya partisipasi dan koordinasi yang aktif oleh semua pihak dalam pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### **1.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis juga menemukan bahwa yang menjadi salah satu penghambat dalam proses penanganan tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah pencairan dana BTT yang lambat sehingga mempengaruhi pada pelaksanaan pembagian logistik untuk korban banjir pada saat tanggap darurat, namun BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat mengatasi hal tersebut dengan membuat perjanjian/kerja sama dengan pihak ketiga terkait pendanaan untuk bantuan logistik.

## **IV. KESIMPULAN**

1. Menurut peneliti, manajemen penanganan tanggap darurat bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah cukup baik namun belum optimal karena ada dua dimensi yang indikatornya dinilai masih terdapat kekurangan oleh peneliti, yaitu dimensi Perencanaan yaitu masih terkendala dalam SOP pelaksanaannya karena belum di tanda tangani oleh Bupati untuk menjadi prosedur yang sah secara hukum. Namun, ada tiga dimensi lain yang berjalan sangat baik dan sudah maksimal, yaitu Pengorganisasian, Penggerakkan, dan Pengawasan, yang dapat dilihat dari pencapaian dan perkembangan indikator yang diberikan.
2. Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan manajemen penanganan tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu: partisipasi *stakeholder* dan masyarakat yang aktif, koordinasi yang baik, dan kebiasaan masyarakat dalam antisipasi bencana banjir yang sudah terbentuk.
3. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan manajemen



penanganan tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu: Sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, anggaran, dan belum memiliki SOP yang sah saat tanggap darurat banjir.

4. Upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Bone dalam mengatasi hambatan terhadap manajemen logistik bencana bagi korban bencana banjir, yaitu meminta bantuan kepada pihak lain dan mengadakan pelatihan, melakukan apel siaga, menggunakan dana siap pakai dan bekerja sama dengan pihak ketiga, melakukan sosialisasi, dan menyesuaikan SOP yang bersifat umum dengan daerah sendiri.

**Keterbatasan Peneliti:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian:** Penulis menyadari bahwa masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan manajemen penanganan tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Mahardika, D., & Setianingsih, E. L. (2018). Manajemen Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Banjir di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 502-518.

Nurrohman, N. (2022). *MANAJEMEN TANGGAP DARURAT BENCANA MASYARAKAT RELAWAN INDONESIA (MRI) WILAYAH BENGKULU (STUDI KASUS BENCANA BANJIR BENGKULU MEI 2019)* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

Sari, A. A., Sabilla, A. A., & Hertati, D. (2020). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik. *Syntax*, 2(5), 21-35.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.